

KAJIAN KEPEMIMPINAN WALIKOTA PEKALONGAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Muhammad Adnan

Abstract

Improving people's welfare is an important indicator for the leadership's success of a regional leader. With numbers of indicators, Pekalongan is one area that was considered successful under the leadership of dr. Bashir Ahmad from 2005-2010 and 2010-present. The success is determined by various factors both personal and environmental factors.

This research was conducted to answer the problem of personality strenght aspect/political personality (microenvironment) and social environment aspect (macroenvironment)that support or reject the mayor's political leadership, dr. Bashir ahmad. Using qualitative analysis as type of research with in-depth interview and documentation study as data collecting technique.

The result of this research shows that the successful leadership of dr.Bashir as mayor of Pekalongan in realizing people's welfare with micro analysis is influenced by his personal's character which are visionary, hardworker, committed in vision and programs that has been established, unyielding, and dare taking risks. While in macro perspective, the success of bashir's leadership is determined by his ability to establish patterns of good communication with parliament, NGO's, and mass media so he can create conducive and productive climate. And in reforming the bureaucracy.

Keywords: political leadership, analysis Micro-Macroenvironments

A. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah daerah. Terlebih dengan model desentralisasi saat ini, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas untuk melakukan akselerasi dan kreativitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi yang demikian, kepala daerah kemudian menjadi aktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai aktor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kepemimpinan kepala daerah tidak saja kepemimpinan yang mampu mengendalikan berbagai kepentingan politik para elit di daerah, memaksimalkan kinerja birokrasi, namun lebih dari itu adalah kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Pekalongan sebagai salah satu daerah otonom merupakan Kota yang dinilai memiliki kinerja baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penanggulangan kemiskinan misalnya, tingkat kemiskinan di Kota Pekalongan mencapai 8,6% pada tahun 2010, angkat tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Jawa Tengah seperti dengan Kota Tegal yang masih lebih dari 10%.

Keberhasilan Kota Pekalongan ini sulit dijelaskan tanpa melibatkan persoalan leadership Walikotanya yang *notabene* seorang dokter, yang dikenal sangat dekat dengan kalangan rakyat miskin, memiliki personalitas hangat dan seorang keturunan Arab yang telah melampaui batas-batas kesukuan. Seorang Walikota yang masih menyisakan waktu-nya untuk melayani pasien khususnya dari kalangan masyarakat bawah.

Namun demikian, penelitian ini tidak hanya memusatkan perhatian pada aspek personalitas Walikota saja (*microenvironment*) akan tetapi untuk mendapatkan cakupan kajian yang lebih luas dan menghindari *bias* maka pendekatan *macroenviroment* juga akan dilakukan.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek kekuatan personalitas/*political personality (microenvironment)* dan aspek lingkungan sosial

(*macroenvironment*) yang mendukung maupun yang menolak eksistensi kepribadiannya tetapi yang pada level tertentu menjadi kekuatan bagi personalitas tersebut. Dengan kondisi diatas bagaimana upaya yang dilakukan untuk oleh Walikota Pekalongan menciptakan *transforming leadership* sebagai bekal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. PEMBAHASAN

B.1. Analisis *Microenvironment*

dr. Basyir dikenal sebagai sosok berkemauan kuat dan pekerja keras. Sifat itulah yang kemudian menjadikan visi yang dimilikinya secara serius diperjuangkan hingga terlaksana. Ketikadr. Basyir sudah memiliki keinginan berupa program/kegiatan misalnya, maka dr. Basyir akan berupaya keras untuk mewujudkannya meski awalnya tidak di setujui oleh kalangan dewan sekalipun. Berbagai cara, dalam makna positif, dilakukan untuk mewujudkan apa yang telah di cita-citakan dan di janjikkannya.

Terkait dengan etos kerja keras yang diteladankan oleh dr. Basyir adalah sebagaimana yang disampaikan oleh informan, bahwa ketika ada kunjungan ke Jakarta dr. Basyir beserta rombongan seringkali harus mandi di Stasiun Gambir untuk menghemat waktu. Bahkan bila jalanan sudah mulai macet maka dr. Basyir tanpa canggung langsung mencari ojek agar dapat segera menuju kantor-kantor kementerian yang menjadi tempat tujuan. Dalam setiap perjalanannya ke ibu kota dr. Basyir selalu berusaha mengefektifkan perjalanan dinasnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Etos kerja keras juga ditunjukkan dengan praktik melayani pasien yang dilakukan ditengah-tengah kesibukannya sebagai walikota.

Sebagai seorang dokter, yang memiliki darah keturunan Arab, beliau telah sejak lama dikenal sebagai tokoh yang memiliki jiwa sosial sangat tinggi. Selain melalui berbagai kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan yang diikutinya, dr. Basyir seringkali memberikan pengobatan gratis terhadap pasien tidak mampu. Bahkan sering kali justru memberikan uang saku untuk pasien tersebut.

B.2. Analisis *Macroenvironment*

B.2.a. Soliditas Dukungan Partai Politik

Pasangan walikota dan wakil walikota yang sedang menjabat saat ini, yaitu dr. HM Basyir Ahmad dan H. Arslan Junaid, bukanlah pasangan yang diusung oleh mayoritas partai di parlemen. Namun hanya melalui dua partai saja yaitu Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan total jumlah kursi di parlemen hanya 10 kursi dari 25 kursi yang ada. Demikian halnya pada era kepemimpinan pertama tahun 2005-2010 dimana pasangan HM Basyir Ahmad dan H. Abu Almafachir yang hanya didukung oleh partai Golkar dengan jumlah 5 kursi di DPRD. Oleh karenanya dibutuhkan komunikasi politik yang tepat untuk dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Adanya dukungan yang positif yang diperoleh dari kalangan dewan (DPRD) dikarenakan program dan kebijakan yang digelontorkan oleh pemerintah kota mayoritas bersifat populis serta menyentuh kebutuhan masyarakat sejauh ini selalu memperoleh dukungan yang positif dari kalangan DPRD.

Kondusifnya hubungan yang terjalin antara eksekutif dengan legislatif, meski sesekali juga terjadi ketegangan, di Kota Batik ini tidaklah dibangun dalam waktu singkat. Hal ini berproses sejak awal masa periode pertama kepemimpinan dr. HM Basyir Ahmad bersama wakilnya dahulu, H Abu Almafahir hingga sekarang berpasangan dengan H Arslan Djunaid. Tak ubahnya tabiat politik yang seolah tak

mengenal kawan atau lawan sejauh kepentingan semata, keharmonisan kedua lembaga (eksekutif dan legislatif) tersebut seringkali juga mengalami ketegangan.

Terdapat pula upaya khusus yang sengaja dilakukan oleh dr. Basyir untuk selalu memperbaiki hubungan dan komunikasinya terhadap DPRD. Salah satunya adalah transparansi. Melalui transparansi (keterbukaan) yang dimulai sejak perencanaan hingga capaian hasil kinerja. Semuanya dipaparkan secara profesional dan rasional tanpa ada rekayasa ataupun pengondisian.

Di sisi lain, untuk semakin menghangatkan hubungan dan komunikasi diantara lembaga eksetif dan legislatif tersebut dibangun suasana kekeluargaan melalui acara-acara di luar kedinasan. Sebagaimana diketahui bahwa istri dr. Basyir juga tercatat sebagai anggota DPRD Kota Pekalongan yang berasal dari fraksi Golkar. Hal ini pulalah yang turut mendorong dan memperlancar harmonisasi kedua lembaga tersebut.

B.2.b. Vokalitas dan Akseptabilitas LSM

Tak hanya disegani oleh sesama rekan dan “rival” politiknya baik di DPRD maupun di luar parlemen, di mata LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pun secara umum dr. Basyir meninggalkan citra positif. Melalui hasil keringat dan kerja kerasnya membangun serta memberdayakan masyarakat Kota Pekalongan dr. Basyir cukup memperoleh banyak pujian dari berbagai pihak, termasuk LSM.

Keberhasilan ini salah satunya dikarenakan dalam proses pembangunan, LSM dipandang sebagai potensi dan diajak berpartisipasi dan bekerja sama membangun, memberdayakan dan memecahkan permasalahan sosial kemasyarakatan.

Diikutsertakannya LSM dalam partisipasi pembangunan, turut mendorong keberhasilan akselerasi pembangunan di Kota Pekalongan. Hal ini selain terbukti mempercepat dan keterbukaan pembangunan di satu sisi, di sisi lain mengembangkan kondusifitas kehidupan sosial politik masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan minimnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ataupun aliansi LSM lainnya.

B.2.c. Loyalitas Birokrasi

Berbagai perubahan dan kemajuan lain juga berhasil dicapai terutama dalam pembangunan birokrasi, baik secara struktural maupun budaya. Pada awalnya seringkali birokrasi tidak mampu merespon pola kerja walikotanya yang cukup agresif dan progresif tersebut. Sehingga seringkali apa yang menjadi visi pemimpin tidak mampu diterjemahkan dan direalisasikan secara cepat dan tepat.

Kemudian melalui reformasi birokrasi yang digalakkan perlahan tetapi pasti kinerja birokrasi dapat dikatakan semakin meningkat. Reformasi birokrasi yang dimulai melalui kebijakan *zero growth* kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas birokrasi agar dapat bekerja secara cepat menyerap dan memecahkan permasalahan masyarakat serta mengikuti ritme kerja walikotanya.

Pendistribusian pegawai negeri sesuai dengan latar belakang dan kemampuannya juga menjadi modal utama dalam upaya membangun birokrasi yang responsif di Kota Pekalongan. Prinsip *the right man in the right place* benar-benar diaplikasikan tanpa adanya muatan politis. Sehingga tak jarang bahwa akhirnya mereka yang lebih muda dan visioner dapat berkembang secara pesat dalam karier. Tanpa terlalu kaku terbebani oleh mekanisme daftar urutan kepegawaian yang seringkali lebih memperhatikan pangkat dan golongan ketimbang *skill* pegawai yang bersangkutan.

Penyerapan nilai-nilai dan etos kinerja perusahaan privat ke dalam tubuh birokrasi tersebut dapat dikatakan cukup berhasil diwujudkan di jajaran pemerintahan Kota Pekalongan. Bahkan saat ini telah berkembang merambah pada kinerja birokrasi berbasis teknologi informasi. Terutama terkait dengan penggunaan *Operational System* (OS), misalnya, kini mulai digunakan OS resmi yang berbasis Linux. Selain itu pelaksanaan *e-government* telah mulai dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Bahkan kini mulai diujicobakan kerja sama penggunaan teknologi informasi dalam proses pelayanan publik bersama LIPI. Hal ini tujuannya semata-mata digunakan untuk memberikan pelayanan birokrasi yang maksimal dan profesional, sehingga dapat merespon perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks secara efektif dan efisien.

Kemampuan seorang pemimpin dalam mengkomunikasikan visi dan misinya terhadap bawahan merupakan salah satu prasyarat keberhasilan manajerial pemimpin tersebut. Begitu pula dengan seorang kepala daerah harus cakap dalam mengkomunikasikan visi dan misinya agar dapat ditangkap oleh jajaran birokrasinya. Karena sebaik dan sesempurna apapun visi dan misi yang diemban seorang kepala daerah tetapi bila salah dalam memilih strategi komunikasi terhadap birokrasi yang dipimpinnya maka potensi untuk tidak terwujud akan menjadi lebih besar. Bahkan bias jadi justru dapat menimbulkan konflik tersendiri. Maka saat seperti inilah seni kepemimpinan seorang kepala daerah diuji. Yaitu bagaimana seorang kepala daerah dapat menggerakkan birokrasinya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkannya sendiri.

B.2.d. Kondusivitas Media Massa

dr. HM Basyir Ahmad merupakan sosok yang dikenal ramah terhadap awak media. Terhadap wartawan manapun dan kapanpun beliau mengaku selalu siap untuk dimintai keterangan. Keterbukaan dan keluwesan dalam memberikan penjelasan terhadap para wartawan merupakan nilai tambah bagi seorang kepala daerah. Menjaga hubungan agar tetap harmonis terhadap para pelaku media massa merupakan kebutuhan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini penting untuk membangun citra positif di mata publik. Terlebih dengan jangkauan media massa yang sangat luas dapat menjadi ajang promosi gratis baik bagi pribadi walikota sendiri maupun citra pemerintah kota secara umum.

Kesadaran dr. Basyir terhadap arti penting peran media massa ini terlihat dengan upaya mendekatkan diri dengan para wartawan dengan diadakannya agenda *coffee morning* yang sengaja diselenggarakan oleh pemerintah kota.

Keharmonisan antara walikota dengan awak media ini nampak dengan minimnya pemberitaan negatif yang menyangkut Pemerintah Kota Pekalongan. Sebaliknya pemberitaan dengan intensitas yang cukup tinggi adalah pemberitaan yang menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah.

Namun demikian suatu kali hubungan walikota dengan media massa juga pernah mengalami ketegangan. Begitulah dinamika yang terjadi antara walikota dan media massa. Tetapi ketegangan tersebut dapat segera dicairkan sehingga tak sampai berlarut-larut.

C. PENUTUP

Keberhasilan kepemimpinan dr. Basyir sebagai walikota Pekalongan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan analisis *micro* dipengaruhi oleh sifat pribadi dr. Basyir yang visioner, pekerja keras, komitmen terhadap visi dan program yang telah ditetapkan, pantang menyerah, dan berani mengambil resiko.

Kemampuan dr. Basyir membangun hubungan yang produktif dan kondusif dengan DPRD, partai politik, LSM, media massa, serta manajemen birokrasi yang baik merupakan kunci keberhasilan dari sudut pandang analisis *macroenvironments*.

DAFTAR RUJUKAN

- Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Lexi J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Rosdakarya, 2002.
- Neuman, W Lawrence. *Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approach*. Boston. Allyn and Bacon. 1997
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grasindo, 2007.
- Patton, M Quinn, *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.2006.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusamedia. Bandung.2009
- Syaukani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Sinambela, Mahadi & Azhari S, *Dilema Otonomi daerah & Masa Depan Nasionalisme Indonesia*. Yogyakarta, Balairung & Co, 2003.
- Surya Adisubrata, Winarna, *Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia (Sejak Proklamasi sampai Awal Reformasi)*. Semarang, Aneka Ilmu, 2003.